



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI TRIHARIYONO**
2. Jabatan : **LURAH SIDODADI**
3. NHK : **243561**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 342 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **27.500.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R T 105 ERD Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 E1F02N12M2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO G SPD-MTR/SOLO 113 CC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA YAMAHA VIXION Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **55.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **150.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **632.500.000**

III. HUTANG Rp. **80.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **552.500.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ HIDAYATI
2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN SIDODADI
3. NHK : 860410

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **890.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
3. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Bangunan Seluas 4 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **135.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOTER Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	180.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.205.000.000
III. HUTANG	Rp.	17.147.862
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.187.852.138

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD TAUFIK
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KELURAHAN SIDODADI
3. NHK : 873357

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	---
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	113.500.000
1. MOTOR, HONDA ASTREA GRAND Tahun 2004, HASIL SENDIRI		
Rp. 3.500.000		
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI	Rp.	
110.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	117.500.000

III. HUTANG Rp. 109.586.112

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.913.888

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN SAMARINDA ULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : E.HASLINDA PUSPITA PANCA DEWI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
3. NHK : 438270

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	400.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1,3 G WTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	---
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	147.500.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	647.500.000
III. HUTANG	Rp.	33.954.205
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	613.545.795

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DESY MARLINDA**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN SIDODADI**
3. NHK : **1005228**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	21.477.520
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.477.520

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **21.477.520**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.